

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak tokoh militer yang menonjol pada masa Orde Baru terdapat beberapa Jenderal yang memiliki peranan sangat penting, yang disebut sebagai kelompok inti lingkaran dalam Soeharto. Jenderal-jenderal tersebut antara lain Ali Moertopo, Yoga Sugama, dan Benny Moerdani. Namun diantara para Jenderal tersebut, terdapat satu laksamana yang juga termasuk dalam lingkaran dalam kekuasaan Soeharto, orang tersebut adalah Sudomo (Jenkins, 2010, hlm. 29).

Sudomo dilahirkan di Malang pada 20 September 1926 dari pasangan Kastawi Martomihardjo dan Saleha. Sudomo kecil lahir dan tumbuh dilingkungan suasana Islami. Sudomo merupakan anak sulung dari lima bersaudara. Ibunya seorang ibu rumah tangga dan Ayahnya adalah seorang guru/penilik yang dikemudian hari dipindah tugaskan mengajar di Probolinggo. Akhirnya Sudomo beserta keluarganya pindah ke Probolinggo. Sudomo pun menyelesaikan pendidikan dasar HIS (Holand Inlandsche School) di Probolinggo pada tahun 1939. Salah satu teman satu sekolahnya di HIS adalah Soemitro. Nantinya ternyata keduanya akan bekerjasama di lembaga KOPKAMTIB, pada tahun 1971 sampai 1974 Soemitro menjadi Panglima Kopkamtib dan Sudomo menjadi wakilnya (Pour, 1997 hlm.7-9).

Setelah tamat dari HIS Sudomo melanjutkan pendidikannya di MULO namun tidak dapat menyelesaikannya karena kedatangan tentara Jepang pada tahun 1942. Ketika Jepang menguasai Indonesia banyak sekolah-sekolah Belanda yang tutup. Karena tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya di MULO Sudomo dipindahkan oleh orangtuanya ke SMP Tjelaket di Malang. Sudomo sebenarnya sempat mendaftar untuk mengikuti pendidikan calon perwira PETA di Surabaya namun ditolak karena menderita amandel. Setelah tidak lulus tes masuk pendidikan PETA, Sudomo mendaftarkan diri untuk menjadi siswa pendidikan angkatan ke II di Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) Cilacap (Pour, 1997 hlm. 9-13).

Karir militer cemerlang seorang Sudomo tentu saja ditunjang oleh bekal ilmu yang mendalam. Setelah lulus dari sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) Cilacap

Sudomo meneruskan pendidikan tinggi militer angkatan laut beberapa kali. Pendidikan militer yang pernah dijalani Sudomo diantaranya; *Dutch Navy Gunnery School Den Helder, Holand (1952)*, *Destroyer Captain Training Gdynia, Poland (1959)*, *Indonesian Defence College Lemhanas, Jakarta (1965)*, *Marine Paratrooper Training Surabaya (1966)*, *Navy Staff College Jakarta (1968)* (Wilson, 1992 hlm 15).

Berbekal pengalaman pendidikan militer Angkatan Laut tersebut Sudomo akhirnya dipercaya dalam tugas Operasai Mandala untuk pembebasan Irian Barat oleh Presiden Sukarno. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden/KEPRES No. 1/1962 Brigadir Jenderal Suharto ditunjuk Menjadi Panglima Mandala dan Sudomo ditugaskan untuk menjadi wakilnya (Pour, 1997 hlm. 119).

Komando Mandala merupakan satuan tugas Komando Perang untuk pembebasan Irian Barat, Komando Mandala mengkoordinir tiga angkatan perang yakni Angkatan Darat, Laut dan Udara. Masing-masing angkatan tersebut dipimpin oleh seorang Panglima, untuk memimpin Angkatan Laut Mandala Laksamana Raden Edy Martadinata mengajukan nama Kolonel Sudomo kepada KOTI. Selain dipilih menjadi Panglima Angkatan laut Mandala, Sudomo juga dipercaya oleh Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto untuk menjadi wakilnya dalam operasi tersebut (Pour, 1997 hlm. 122).

Pada masa Soeharto berada di puncak kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia ia menempatkan orang – orang kepercayaannya untuk menempati posisi – posisi penting, termasuk salah satunya Laksamana Sudomo. Pada masa kekuasaannya Presiden Suharto memiliki pengaruh yang sangat kuat dan berada sendirian di puncak piramida kekuasaan yang dibangunnya sehingga ia mampu melakukan apa saja demi kepentingannya termasuk mengangkat orang-orang kepercayaannya di jabatan apapun (Said, 2016, hlm 47).

Bagi kekuasaan Orde Baru Sudomo adalah orang yang sangat penting, hal tersebut seperti yang diutarakan Wilson (1992, hlm. 56),

But to the President, the New Order and a vast array of key and sensitive issues, Sudomo has been indispensable—a person who, because of his loyalty, integrity, intelligence, persuasiveness and charm, has made a

qualitative difference in the affairs of the nation and their outcome. His willingness to subordinate himself and his special talents to the direction of the President and the nation, while remaining open in his advice, has made him indispensable. There may be others in the inner circle who possess many of his unique qualities, but either because they lacked his integrity, trust and honesty or were possessed with vanity, they became dispensable in a professional sense and thus ineffective.

Terjemahan:

Akan tetapi bagi presiden, Orde baru, kunci kesatuan militer, dan beberapa isu sensitif, Sudomo menjadi sosok yang tidak tergantikan, dikarenakan loyalitasnya, integritasnya kecerdasannya keteguhannya dan daya tariknya yang membuatnya memiliki kualifikasi untuk mengurus kepentingan negara. Kesediannya untuk tidak terlalu menonjolkan diri ketimbang Soeharto dan kualifikasi kemampuannya, ditambah Sudomo pun terbuka untuk mendapat nasehat, hal-hal tersebut membuatnya tak tergantikan. Tetapi kualifikasi tersebut tidak dimiliki para Jenderal lain dalam lingkaran dalam Soeharto ketika mereka mendapat kepercayaan lebih dari Soeharto memberi mereka rasa percaya diri berlebih untuk menonjolkan diri di masyarakat, itu menjadikan mereka tidak lagi diperlukan.

Dalam kutipan di atas Wilson menerangkan betapa Sudomo menjadi sosok yang sangat penting bagi Presiden Suharto dan kekuasaan Orde Baru karena Sudomo memiliki loyalitas, integritas, kecerdasan, keyakinan dan daya tarik. Tetapi disamping kelima hal tersebut, yang paling penting bagi Presiden Suharto yang ada pada diri Sudomo adalah Sudomo dinilai tidak memiliki ambisi yang besar apalagi untuk menjadi Presiden. Seperti yang kita ketahui selama ini Suharto seringkali memelihara konflik diantara para Jenderal berbakat untuk kepentingannya kemudian para Jenderal tersebut pada akhirnya disingkirkan ketika dirasa terlalu populer dan diisukan memiliki ambisi untuk menjadi Presiden.

Selama masa Orde Baru Sudomo memegang jabatan-jabatan penting baik dalam lembaga militer maupun di dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan yang pernah dipegang Sudomo ketika masa Orde Baru yakni Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) dari tahun 1969 hingga tahun 1973, masuk dalam KOPKAMTIB dari tahun 1973 sebagai Wakil Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kemudian menjadi KASKOPKAMTIB tahun 1974 sebelum pada akhirnya diangkat menjadi Panglima KOPKAMTIB pada tahun

Hamdan Semendawai, 2020

PERANAN SUDOMO DALAM BIDANG MILITER DAN POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1969-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1978 hingga 1983, ketika menjadi Pangkoptik Sudomo sekaligus juga menjadi WAPANGAB. Sudomo pensiun dari dunia militer tahun 1983 di usia 57 tahun. Selepas pensiun Sudomo kemudian dipercaya dua kali memegang jabatan menteri pada masa kepemimpinan Presiden Suharto yakni Menteri Tenaga Kerja di tahun 1983 hingga 1988 dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (1988-1993), pada 1993 Sudomo dipilih menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai dengan 1998 (Pour, 1997).

Dalam karir militer pada masa Orde Baru, jabatan Panglima Kopkamtib merupakan jabatan yang paling menarik untuk dikaji. Kopkamtib adalah satu dari beberapa lembaga khusus yang digunakan Suharto untuk menyingkirkan kekuatan-kekuatan yang mengganguya. Kopkamtib diadakan untuk menumpas pemberontakan G30S/PKI dan sisa-sisanya (Bachtar, 1988, hlm. 24).

Pengaruh PKI telah sejak lama memasuki angkatan bersenjata Republik Indonesia, termasuk juga kedalam Angkatan Laut. Maka ketika Soeharto mendapat Supersemar dan berusaha membersihkan PKI, tugas untuk membersihkan Angkatan Laut dari Pengaruh PKI ditugaskan kepada Sudomo. Suharto mempercayakan penanganan PKI di dalam tubuh angkatan Laut pada Sudomo, kepercayaan tersebut tidak terlepas dari pengalaman Soeharto bekerjasama dengan Sudomo saat Operasi Mandala (Pour, 1997, hlm. 163).

Menjelang akhir tahun 1969 Suharto berupaya melakukan reorganisasi ABRI secara besar-besaran. Sudomo pun diberi kepercayaan yang lebih besar, yakni menjadi KASAL. Tugas berat yang dihadapi Sudomo ketika awal menjadi KASAL adalah menumpas sisa-sisa PKI di dalam Angkatan Laut, karena usai pelantikan Sudomo langsung menyebutkan mengenai masih terdapatnya anasir-anasir G30S/PKI di dalam tubuh Angkatan Laut. Pada perkembangan selanjutnya, Kopkamtib bukan hanya menangani masalah keamanan dan ketertiban pada masa-masa pasca G30S saja tetapi lembaga tersebut masih difungsikan pada masa pemerintahan Soeharto yang merupakan Panglima Komando pertamanya (Pour, 1997, hlm. 174).

Setelah resmi menjadi Presiden, Suharto berupaya untuk membentuk jaringan kekuatan, Suharto sadar akan posisinya yang masih belum kuat “karena itu, selain

Hamdan Semendawai, 2020

PERANAN SUDOMO DALAM BIDANG MILITER DAN POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1969-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lembaga-lembaga resmi pemerintahan, ia juga mulai mendirikan lembaga-lembaga tidak resmi seperti Kopkamtib, Opsus (Operasi Khusus), dan Aspri (Asisten Pribadi) yang sepenuhnya bersifat loyal pada dirinya (Yogaswara, 2009 hlm. 20-21).

Meskipun pada awalnya Kopkamtib lahir dari situasi khusus untuk menangani permasalahan yang timbul pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI dan untuk meredam kekacauan saat itu, tetapi pada perkembangan selanjutnya Suharto yang telah menjadi Presiden memilih untuk tetap menghidupkan keberadaan Kopkamtib dan bahkan mengembangkan lembaga tersebut menjadi semakin kuat. Pada masa kekuasaan Orde Baru bahkan wewenang dan fungsi Kopkamtib semakin dikuatkan. Kopkamtib tidak hanya mengurus permasalahan PKI dan sisa-sisa kekuatannya tetapi juga menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara. Bahkan saking luasnya wewenang tersebut menjadikan Kopkamtib sebagai lembaga super yang mampu dimanfaatkan oleh Suharto. Jadi dalam perkembangan selanjutnya Kopkamtib menjadi alat kekuasaan Suharto untuk mengamankan posisinya (Pour, 1993, hlm. 495).

Sesuai dengan namanya maka tugas dari lembaga tersebut adalah memastikan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, namun dalam pandangan masyarakat Kopkamtib menjadi lembaga yang cukup angker. Diantaranya karena tindakan-tindakan kontroversialnya seperti Petrus (penembak misterius) dan beragam aksi penculikan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang sudah mulai dijalankan sejak zaman Sudomo menjabat Pangkoptib. Seperti yang diutarakan dalam buku Salim Said (2016, hlm 75-76) berikut,

Seorang mantan pembantu dekat Moerdani membantah atasannya yang memelopori kegiatan Petrus pada tingkat nasional. Sebelum menjadi Pangkoptib, menurutnya, Laksamana Sudomo sebagai pejabat tertinggi Kopkamtib yang digantikan Moerdani, sudah melancarkan sejumlah operasi pembasmian bandit. Konon Sudomo menjelaskan, "Mereka sudah sangat keterlaluan". Karena itu, Kopkamtib melancarkan Operasi Celurit pada 1982.

Sementara itu dalam buku Suharto; Sebuah Biografi Politik, penulisnya Elson (2005, hlm. 336) berpendapat bahwa,

Lembaga yang pada awalnya dibentuk dengan mandat untuk mengamankan Negara terhadap ancaman komunis ini, tak diragukan lagi, atas dorongan Suharto, dan mungkin berbarengan dengan langkahnya untuk memusatkan kekuatan ABRI, semakin mewujudkan dirinya sebagai alat untuk menindas kalangan mana pun yang diduga mengancam Negara.

Kopkamtib menjadi salah satu lembaga andalan Presiden Soeharto pada masa Rezim Orde Baru berkuasa sebagai senjata untuk meredam kekuatan-kekuatan yang dinilai membahayakan keamanan nasional dan khususnya membahayakan tampuk kekuasaan Presiden.

Keutamaan Kopkamtib dibandingkan organisasi keamanan-intelejen lainnya adalah kendalanya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia hingga ke desa - desa. Para komandan militer provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa juga menjabat sebagai petugas eksekutif Kopkamtib. Mereka diberi kewenangan menggunakan kekuasaan Kopkamtib untuk menangkap dan menahan siapapun tanpa persidangan” (Kasenda, 2013 hlm 73-74).

Maka Kopkamtib adalah salah satu alat yang ikut mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan Presiden Republik Indonesia dan mengamankan posisi Soeharto sebagai Presiden dengan menjegal lawan-lawan politiknya menggunakan dalih menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Hal tersebutlah yang menjadikan jabatan sebagai Panglima Kopkamtib menarik untuk dikaji.

Panglima Kopkamtib adalah posisi terakhir Sudomo di dalam tubuh militer, setelahnya Sudomo memutuskan untuk Pensiun sebagai tentara. Meski telah menarik diri dari dunia militer namun kepercayaan Presiden Soeharto terhadap Sudomo masih berlanjut, karena setelah itu Sudomo diangkat menjadi salah satu Menteri dalam Kabinet Pembangunan III. Kesan angker yang ada pada diri Sudomo ketika menjabat sebagai Pangkopkamtib masih tergambar dalam benak masyarakat Indonesia pada saat itu. Presiden Soeharto menunjuk Sudomo menjadi Menteri Tenaga Kerja konon karena melihat kesigapan laksmana tersebut sewaktu dalam posisi sebagai Panglima KOPKAMTIB, berhasil menyelesaikan berbagai macam gejolak sosial dengan sukses (Pour, 1997 hlm 282).

Setelah menjadi Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Pembangunan III Sudomo kembali dipercaya menjadi menteri dalam Kabinet Pembangunan IV oleh

Presiden Soeharto di periode pemerintahan selanjutnya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sebagai Menkopolkam Sudomo bertugas untuk memastikan pengamanaan kebijaksanaan pemerintah atau juga bisa dikatakan menjadi bempes pemerintah. Salah satunya ketika terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait kebijakan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) yang sering dipelesetkan menjadi Sudomo Datang Semua Beres yang menggambarkan betapa pentingnya peran Sudomo di masa Orde Baru yang salah satunya mampu menjaga stabilitas keamanan (Pour, hlm. 319).

Jabatan lain yang menarik untuk dikaji adalah ketika Sudomo menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Peristiwa yang paling diingat ketika masa ini adalah ketika Sudomo mengeluarkan surat sakti atau katebelece yang kemudian dimanfaatkan oleh Koruptor yang terkenal di Indonesia Eddy Tansil. Setelahnya Eddy Tansil melarikan diri ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Sudomo dianggap sangat bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Kasus BAPINDO ternyata menyita banyak sekali perhatian masyarakat, baik dari kalangan bankir, usahawan, politisi, dan mahasiswa maupun masyarakat awam. Hal tersebut menjadi peristiwa yang menggemparkan di Indonesia karena merugikan keuangan Negara sebesar 1,3 triliyun rupiah. Kasus BAPINDO menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji terkait kebijakan Sudomo dalam konteks bidang Politik (Suwirta, 2018, hlm. 174).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas mengenai masa kekuasaan rezim Orde Baru yang penting untuk dikaji dan keterlibatan Sudomo didalamnya, maka peneliti merasa sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Peranan Sudomo dalam bidang militer dan politik pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1969-1993” kedalam sebuah karya tulis skripsi. Kajian dalam penulisan skripsi ini dimulai tahun 1969 ketika Sudomo menjadi kepala staf TNI Angkatan Laut dan dibatasi kajiannya hingga tahun 1998 dengan berakhirnya jabatan Sudomo sebagai Ketua DPA.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah utama yang akan dikaji adalah “Bagaimana Peranan Sudomo dalam bidang militer dan politik pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1969-1998?”. Sedangkan perumusan masalah yang lebih rinci untuk mengarahkan pembahasan materi akan dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimana peranan Sudomo dalam bidang militer ketika masa Orde Baru?
2. Bagaimana peranan Sudomo ketika menjadi menteri dan ketua DPA pada masa Orde Baru?
3. Bagaimana tanggapan kawan dan lawan politik Sudomo terhadap kebijakan-kebijakan Sudomo dalam bidang militer dan politik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mendeskripsikan peranan Sudomo dalam bidang militer ketika masa Orde Baru
2. Mendeskripsikan peranan Sudomo dalam bidang politik ketika masa Orde baru
3. Menjelaskan tanggapan kawan dan lawan politik Sudomo kebijakan-kebijakan dalam bidang militer dan politik

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktik. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan mengenai sejarah peranan Sudomo dalam kehidupan politik Orde Baru. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Menambah pustaka dan penulisan sejarah Indonesia pada babak Rezim Orde Baru berkuasa, terutama di lingkup Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

2. Memberi pandangan baru mengenai kebijakan militer dan politik pemerintah pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan Sudomo
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian sejarah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia.

1.5. Struktur Organisasi

1. Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan mencakup beberapa bagian yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian adalah pemaparan mengenai alasan-alasan peneliti memilih melakukan kajian mengenai judul ini. Latar belakang masalah menunjukkan seberapa pentingnya penelitian ini dilakukan.

Dilatar belakang masalah penulis pertama-tama memaparkan mengenai sejarah munculnya Kopkamtib dan perkembangan selanjutnya sampai kepada saat Kopkamtib dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Penulis juga menjelaskan mengenai alasan mengangkat sepak terjang Laksamana Sudomo sebagai Pangkoptib sebagai pembahasan. Setelah menjelaskan konsep latar belakang masalah kemudian penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan pembahasan penelitian dan juga batasan penelitian.

Setelah menyusun latar belakang masalah selanjutnya penulis membuat rumusan masalah. Rumusan masalah serta pembatasan masalah diperlukan untuk dapat membantu mengidentifikasi pengetahuan dan kerangka teoritis yang diperlukan sehingga pembahasan dapat fokus dan terarah. Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Dalam rumusan masalah penulis mengajukan tiga pertanyaan yang dirasa penting untuk bisa menjawab pertanyaan utama dan mampu menjelaskan substansi dari judul yang ditulis (Kosasih dan Hermawan, 2012, hlm. 190).

Hamdan Semendawai, 2020

PERANAN SUDOMO DALAM BIDANG MILITER DAN POLITIK PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1969-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya dalam bab ini memaparkan mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian adalah target dan harapan yang ingin dicapai secara akademis baik bagi penulis maupun lembaga kampus dan masyarakat umum dari penelitian yang dilaksanakan ini.

2. Bab II. Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka disebut juga kerangka teoritis atau teori landasan yang berisikan teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindarkan penulis dari plagiarisme. “Proses penulisan substansi dalam kajian pustaka, diawali dengan kegiatan eksplorasi pengetahuan yaitu inventarisasi teori-teori yang relevan untuk ditelaah secara kritis guna mengidentifikasi dan menganalisis masalah penelitian (*the research problem*) dan pertanyaan penelitian” (Syaefullah, 2015 hlm 61).

Selain seperti yang telah diutarakan diatas, kajian pustaka juga membahas penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang beririsan dengan penelitian yang akan kita lakukan atau mungkin juga sama tetapi menggunakan teori yang berbeda ataupun sudut pandang yang berbeda. Kajian pustaka berguna untuk memberikan persepektif yang lebih jelas mengenai manfaat penelitian yang dilakukan dengan didukung oleh landasan konsep dan teori yang lebih jelas (Kosasih dan Hermawan, 2012, hlm. 193).

3. Bab III. Metode Penelitian

“Menetapkan metode penelitian harus mempertimbangkan kesesuaian metode dengan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, guna didapatkan data yang dipercaya benar (*truth*)” (Syaefullah, 2015 hlm 62). Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode sejarah yang dimulai dari proses heuristic (mencari sumber-sumber yang relevan, kemudian kritik, interpretasi dan terakhir historiografi).

4. Bab IV. Temuan dan Pembahasan

Dalam Bab ini peneliti menyajikan hasil temuan penelitian, dalam metodologi sejarah disebut juga sebagai tahap historiografi. Bab Temuan dan Pembahasan adalah tahapan inti dalam penulisan skripsi ini, dalam pembahasan peneliti

mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam Bab I Pendahuluan.

5. Bab V. Kesimpulan

Dalam bab kesimpulan penulis mencoba menyimpulkan hasil temuan dari keseluruhan pembahasan yang telah dikaji. Kesimpulan penulis susun berdasarkan buah pemikiran penulis pribadi setelah melakukan kajian mengenai pokok bahasan yang diteliti.